

AKUNTANSI KEBERLANJUTAN; AKUNTANSI HIJAU; GOVERNANCE:

Strategi Keberlanjutan Bisnis

Dr. Desak Nyoman Sri Werastuti. SE., M.Si., Ak., CA., CSRA., CSRS

**AKUNTANSI KEBERLANJUTAN;
AKUNTANSI HIJAU; GOVERNANCE
Strategi Keberlanjutan Bisnis**

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

AKUNTANSI KEBERLANJUTAN; AKUNTANSI HIJAU; GOVERNANCE Strategi Keberlanjutan Bisnis

Dr. Desak Nyoman Sri Werastuti. SE., M.Si., Ak., CA., CSRA., CSRS.



AKUNTANSI KEBERLANJUTAN; AKUNTANSI HIJAU; GOVERNANCE Strategi Keberlanjutan Bisnis

Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit Sketsa Media
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang *All Rights Reserved*
Hak penerbitan pada Penerbit Sketsa Media
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin tertulis dari Penerbit

Anggota IKAPI
No. 253/JTE/2022

Terbitan Pertama: April 2026
viii., 251 hlm. A4 (21 cm x 29,7 cm)

ISBN: 978-634-7655-31-8

Penulis:
Dr. Desak Nyoman Sri Werastuti. SE., M.Si., Ak., CA., CSRA., CSRS.

Editor:
Prof. Dr. Anantawikrama Tungga Atmadja, S.E., Ak., M.Si.

Desain Cover:
Privat Lespanglo

Tata Letak:
M. Afiq F.

Diterbitkan Oleh:
CV. Sketsa Media

E-mail: sketsamediaid@gmail.com
Web: www.sketsamedia.id
Buku: www.shop.sketsamedia.id
Whatsapp: 0821-3818-5550

Kantor Operasional

Jl Sumbang - Limpakuwus, RT.01/RW.03, Dusun II, Kebanggan, Kec.
Sumbang, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53182

PRAKATA

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya buku “Akuntansi Keberlanjutan; Akuntansi Hijau; Governance: Strategi Keberlanjutan Bisnis” ini. Buku ini lahir dari kesadaran bahwa dunia usaha tidak lagi dapat berdiri semata-mata di atas orientasi laba jangka pendek, melainkan harus bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkannya.

Perkembangan global menunjukkan bahwa isu keberlanjutan telah menjadi agenda utama dalam praktik bisnis modern. Investor, regulator, dan masyarakat semakin menuntut transparansi atas kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Dalam konteks inilah akuntansi memainkan peran strategis sebagai sistem informasi yang tidak hanya mencatat transaksi finansial, tetapi juga mengukur dan melaporkan dampak nonkeuangan secara terstruktur dan akuntabel.

Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman konseptual sekaligus panduan praktis mengenai akuntansi keberlanjutan dan akuntansi hijau, serta keterkaitannya dengan governance sebagai fondasi strategi bisnis jangka panjang. Pembahasan di dalamnya dirancang secara sistematis, mulai dari landasan teoretis hingga implementasi dalam praktik korporasi.

Penulis berharap buku ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, praktisi akuntansi, manajer perusahaan, serta para pengambil kebijakan yang memiliki komitmen untuk mendorong transformasi bisnis menuju model yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga buku ini memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat peran akuntansi sebagai instrumen perubahan menuju ekonomi yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan.

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 PARADIGMA BARU AKUNTANSI DI ERA KEBERLANJUTAN.....	1
1.1 Evolusi Konsep Akuntansi	1
1.2 Dari Shareholder ke Stakeholder Value	4
1.3 Pergeseran Menuju ESG dan SDGs	6
1.4 Urgensi Transformasi Sistem Pelaporan	9
BAB 2 LANDASAN TEORI AKUNTANSI KEBERLANJUTAN	14
2.1 Definisi dan Ruang Lingkup	14
2.2 Triple Bottom Line	16
2.3 Stakeholder Theory, Legitimacy Theory, dan Institutional Theory	22
2.4 Integrasi Informasi Keuangan dan Non-Keuangan	28
BAB 3 PERAN AKUNTANSI KEBERLANJUTAN DALAM STRATEGI BISNIS	33
3.1 Akuntansi sebagai Alat Pengambilan Keputusan Strategis.....	33
3.2 Sustainability Performance Measurement	37
3.3 Value Creation Jangka Panjang.....	44
3.4 Keunggulan Kompetitif Berbasis Keberlanjutan	50
BAB 4 AKUNTANSI HIJAU: KONSEP DAN PERKEMBANGAN.....	57
4.1 Konsep Green accounting.....	57
4.2 Sejarah dan Perkembangan Global	63
4.3 Green Economy dan Circular Economy	70
4.4 Hubungan Akuntansi Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan.....	76
BAB 5 PENGUKURAN DAN PENGAKUAN BIAYA LINGKUNGAN	83
5.1 Identifikasi Biaya Lingkungan	83
5.2 Environmental Costing.....	90
5.3 Life Cycle Assessment (LCA)	94
5.4 Carbon Accounting dan Jejak Emisi	97
BAB 6 GREEN ACCOUNTING SEBAGAI STRATEGI EFISIENSI DAN NILAI TAMBAH.....	100
6.1 Eco-Efficiency dan Cleaner Production.....	100
6.2 Pengelolaan Limbah dan Energi	103

6.3 Inovasi Produk Ramah Lingkungan.....	106
6.4 Dampak terhadap Profitabilitas dan Reputasi.....	109
BAB 7 ESG DAN KERANGKA PELAPORAN KEBERLANJUTAN	112
7.1 Konsep Environmental, Social, Governance (ESG).....	112
7.2 Standar dan Kerangka Pelaporan (GRI, SASB, IFRS Sustainability, TCFD)	115
1. Global Reporting Initiative (GRI).....	115
2. Sustainability Accounting Standards Board (SASB).....	117
3. IFRS Sustainability Standards (ISSB)	118
4. Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)	120
7.3 Integrated Reporting.....	122
7.4 Assurance atas Laporan Keberlanjutan	126
BAB 8 GOVERNANCE SEBAGAI FONDASI STRATEGI KEBERLANJUTAN	130
8.1 Prinsip Good Corporate governance	130
8.2 Peran Dewan Direksi dan Komite Audit.....	135
8.3 Sustainability Governance Structure	140
8.4 Transparansi dan Akuntabilitas	145
BAB 9 MANAJEMEN RISIKO DAN PENGENDALIAN INTERNAL BERBASIS ESG.	150
9.1 Risiko Lingkungan dan Sosial	150
9.2 Enterprise Risk Management Berbasis Keberlanjutan.....	154
9.3 Sistem Pengendalian Internal ESG.....	158
9.4 Peran Audit Internal dan Eksternal	162
BAB 10 IMPLEMENTASI AKUNTANSI KEBERLANJUTAN DALAM ORGANISASI	166
10.1 Strategi Integrasi dalam Struktur Organisasi.....	166
10.2 Perubahan Budaya dan Kepemimpinan.....	171
10.3 Penyusunan Sustainability Report.....	174
10.4 Tantangan dan Hambatan Implementasi	177
BAB 11 AKUNTANSI KEBERLANJUTAN DAN INVESTASI BERBASIS ESG.....	181
11.1 Sustainable Finance	181
11.2 Green Bonds dan Instrumen Keuangan Hijau	184
11.3 Penilaian Kinerja ESG oleh Investor	187
11.4 Dampak terhadap Nilai Perusahaan.....	189
BAB 12 PERAN REGULASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK.....	193
12.1 Regulasi Nasional dan Internasional	193

12.2 SDGs dan Kebijakan Korporasi.....	195
12.3 Tekanan Regulator dan Pasar Modal.....	197
12.4 Harmonisasi Standar Global	199
BAB 13 STUDI KASUS DAN PRAKTIK TERBAIK.....	203
13.1 Studi Kasus Perusahaan Nasional	203
13.2 Studi Kasus Perusahaan Multinasional.....	206
13.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan	210
13.4 Pembelajaran Strategis.....	212
BAB 14 MASA DEPAN AKUNTANSI KEBERLANJUTAN	216
14.1 Transformasi Digital dan Sustainability Data.....	216
14.2 Artificial Intelligence dalam Pelaporan ESG.....	219
14.3 Tantangan Global dan Disrupsi Iklim	222
14.4 Arah Perkembangan Profesi Akuntan.....	225
RERERENCES	229
INDEKS	244
GLOSARIUM.....	246
PROFIL PENULIS.....	248

BAB 1

PARADIGMA BARU AKUNTANSI

DI ERA KEBERLANJUTAN

1.1 Evolusi Konsep Akuntansi

Sejarah merupakan bagian penting dalam memahami perkembangan suatu ilmu pengetahuan, termasuk akuntansi. Kajian sejarah memungkinkan manusia menelusuri bagaimana suatu konsep lahir, berkembang, dan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Melalui pemahaman terhadap perjalanan sejarah tersebut, berbagai gagasan dan praktik ilmiah dapat dipahami secara lebih komprehensif. Sejarah tidak hanya berfungsi sebagai catatan peristiwa masa lalu, tetapi juga menjadi cermin bagi perkembangan peradaban manusia dan dinamika ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, memahami sejarah suatu disiplin ilmu merupakan langkah penting untuk memahami kondisi ilmu tersebut pada masa kini dan masa depan (Karimah et al., 2024).

Akuntansi merupakan salah satu bidang ilmu yang berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia dan aktivitas ekonomi. Sejak manusia mulai melakukan aktivitas ekonomi seperti jual beli dan pertukaran barang, kebutuhan akan sistem pencatatan transaksi menjadi semakin penting. Aktivitas perdagangan yang semakin kompleks menuntut adanya mekanisme pencatatan yang dapat membantu manusia mengingat serta mengelola berbagai transaksi yang terjadi. Pada tahap awal perkembangannya, akuntansi berfungsi sebagai alat sederhana untuk mencatat transaksi yang terjadi dalam kegiatan perdagangan. Menurut Karimah et al. (2024), sejarah akuntansi telah dimulai sejak awal peradaban manusia ketika transaksi pembelian dan penjualan barang mulai dicatat, diringkaskan, dan dilaporkan sebagai bagian dari aktivitas ekonomi.

Pada masa awal perkembangannya, praktik akuntansi masih bersifat sangat sederhana. Pencatatan transaksi dilakukan menggunakan media yang tersedia pada masa tersebut, seperti batu, tanah liat, kulit kayu, atau bahan alami lainnya. Media-media tersebut digunakan sebagai sarana untuk mencatat berbagai transaksi perdagangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Catatan akuntansi tertua yang diketahui berasal dari Babilonia sekitar tahun 3600 SM, dan praktik serupa juga ditemukan di Mesir serta Yunani kuno. Meskipun pencatatan pada masa itu belum dilakukan secara sistematis, praktik tersebut tetap menjadi fondasi penting bagi perkembangan sistem akuntansi pada masa berikutnya (Karimah et al., 2024).

Perkembangan akuntansi kemudian mengalami perubahan yang signifikan seiring dengan meningkatnya aktivitas perdagangan di berbagai wilayah dunia. Pertumbuhan

perdagangan antarwilayah dan antarnegara mendorong munculnya kebutuhan akan sistem pencatatan yang lebih teratur dan dapat dipercaya. Dalam sejarah pemikiran akuntansi, perkembangan tersebut umumnya dibagi ke dalam beberapa periode utama yang mencerminkan perubahan praktik dan konsep akuntansi. Karimah et al. (2024) menjelaskan bahwa evolusi pemikiran akuntansi dapat dikelompokkan ke dalam tiga periode utama. Periode tersebut meliputi tahun 4000 SM hingga 1300 M yang ditandai dengan pencatatan sederhana (record-keeping), periode 1300 hingga 1850 M dengan munculnya sistem pembukuan berpasangan (double-entry bookkeeping), serta periode setelah tahun 1850 yang menunjukkan perkembangan teori dan praktik akuntansi yang semakin kompleks.

Salah satu tonggak penting dalam perkembangan akuntansi adalah munculnya sistem pembukuan berpasangan (double-entry bookkeeping). Sistem ini berkembang pesat pada masa Renaisans di Italia yang merupakan pusat aktivitas perdagangan pada saat itu. Kebutuhan para pedagang untuk mencatat transaksi secara lebih akurat mendorong lahirnya metode pencatatan yang lebih sistematis. Sistem ini kemudian diperkenalkan dan dipopulerkan oleh Luca Pacioli pada tahun 1494 melalui karyanya yang berjudul *Summa de Arithmetica, Geometrica, Proportioni et Proportionalita*. Sistem pencatatan berpasangan tersebut menjadi dasar bagi sistem akuntansi modern karena memungkinkan pencatatan transaksi secara lebih sistematis melalui konsep debit dan kredit yang saling berpasangan (Karimah et al., 2024).

Seiring dengan perkembangan ekonomi global, akuntansi juga mengalami perkembangan dalam berbagai aspek, baik dari segi teori maupun praktiknya. Pertumbuhan sektor ekonomi yang semakin kompleks menuntut adanya sistem pelaporan keuangan yang mampu memberikan informasi secara akurat dan transparan. Dalam konteks sektor publik, akuntansi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Akuntansi sektor publik tidak hanya digunakan untuk mencatat transaksi keuangan pemerintah, tetapi juga untuk memastikan penggunaan anggaran secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, akuntansi sektor publik berkembang dari sistem yang awalnya hanya berfokus pada kepatuhan terhadap aturan menjadi sistem yang lebih menekankan pada transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam pelaporan keuangan (Rajagukguk et al., 2025).

Perkembangan akuntansi sektor publik juga tidak terlepas dari pengaruh perubahan kebijakan, regulasi, serta perkembangan teknologi informasi. Kemajuan teknologi telah mengubah cara organisasi mengelola dan melaporkan informasi keuangan. Digitalisasi membawa perubahan besar dalam praktik akuntansi, termasuk dalam penyusunan laporan keuangan, pengelolaan data, serta proses audit. Sistem informasi akuntansi berbasis teknologi memungkinkan proses pencatatan dan pelaporan keuangan dilakukan secara lebih cepat dan akurat. Dengan demikian, teknologi informasi membantu meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kualitas pengambilan keputusan dalam pengelolaan keuangan publik (Rajagukguk et al., 2025).

BAB 2

LANDASAN TEORI AKUNTANSI KEBERLANJUTAN

2.1 Definisi dan Ruang Lingkup

Akuntansi keberlanjutan berkembang sebagai respons terhadap perubahan paradigma bisnis modern yang tidak lagi hanya berfokus pada laba semata. Dalam praktik bisnis saat ini, perusahaan juga dituntut untuk memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitasnya. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab perusahaan tidak hanya terbatas pada pemegang saham, tetapi juga mencakup masyarakat dan lingkungan. Menurut Warkula et al. (2025), pelaporan sosial dan lingkungan menjadi fondasi penting dalam perkembangan akuntansi keberlanjutan. Oleh karena itu, sistem akuntansi perlu berkembang agar mampu menyediakan informasi yang lebih komprehensif. Informasi tersebut harus mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara terpadu. Dengan demikian, akuntansi keberlanjutan hadir sebagai jawaban atas kebutuhan sistem informasi yang lebih relevan di era modern.

Secara konseptual, akuntansi keberlanjutan mencakup proses pengukuran, pencatatan, analisis, dan pelaporan informasi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pendekatan ini memperluas cakupan akuntansi yang sebelumnya hanya berfokus pada data keuangan. Informasi nonkeuangan menjadi bagian penting dalam menilai kinerja perusahaan secara menyeluruh. Dalam hal ini, Godfrey et al. (2010) menekankan bahwa informasi akuntansi harus mampu memenuhi kebutuhan berbagai pemangku kepentingan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi tidak lagi sekadar alat pencatatan, tetapi juga sarana komunikasi strategis. Dengan informasi yang lebih lengkap, stakeholder dapat menilai keberlanjutan organisasi secara lebih akurat. Oleh karena itu, akuntansi keberlanjutan menjadi pendekatan yang lebih relevan dalam praktik bisnis modern.

Perkembangan akuntansi keberlanjutan juga dipengaruhi oleh konsep akuntansi hijau yang menekankan integrasi aspek lingkungan dalam sistem akuntansi. Akuntansi konvensional dinilai terlalu berfokus pada aspek keuangan sehingga sering mengabaikan dampak lingkungan. Lako (2018) menyebutkan bahwa akuntansi hijau merupakan paradigma baru yang memperhitungkan aspek sosial dan lingkungan dalam proses akuntansi. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan menyajikan informasi yang lebih lengkap mengenai aktivitasnya. Selain itu, aspek seperti penggunaan sumber daya dan pengelolaan limbah menjadi bagian penting dalam pelaporan. Hal ini membantu

perusahaan menunjukkan tanggung jawabnya secara lebih luas. Dengan demikian, akuntansi hijau menjadi bagian penting dalam perkembangan akuntansi keberlanjutan.

Ruang lingkup akuntansi keberlanjutan mencakup tiga dimensi utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dimensi ekonomi tetap berfokus pada kinerja keuangan seperti laba dan arus kas. Sementara itu, dimensi sosial mencakup kesejahteraan karyawan dan hubungan dengan masyarakat. Di sisi lain, dimensi lingkungan berkaitan dengan dampak aktivitas perusahaan terhadap ekosistem. Menurut Lako (2018), ketiga dimensi ini harus diintegrasikan dalam satu sistem pelaporan terpadu. Integrasi ini memungkinkan perusahaan menyajikan informasi yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, akuntansi keberlanjutan memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan akuntansi tradisional.

Perkembangan konsep ini juga berkaitan dengan perubahan tujuan pelaporan perusahaan. Dalam paradigma tradisional, laporan keuangan hanya ditujukan bagi investor dan kreditur. Namun, dalam konteks keberlanjutan, laporan harus mencerminkan dampak sosial dan lingkungan perusahaan. Gray, Owen, dan Adams (1996) menegaskan bahwa akuntansi perlu memperluas batasannya untuk mencerminkan tanggung jawab sosial organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaporan menjadi bagian dari corporate accountability. Perusahaan harus mampu menunjukkan bagaimana mereka mengelola dampak eksternal secara bertanggung jawab. Dengan demikian, akuntansi keberlanjutan berperan dalam memperkuat akuntabilitas perusahaan.

Konsep akuntansi keberlanjutan juga didukung oleh teori pembangunan berkelanjutan dan triple bottom line. WCED (1987) mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pemenuhan kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan generasi mendatang. Konsep ini menekankan keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Elkington (1997) kemudian memperkenalkan triple bottom line yang mencakup profit, people, dan planet. Ketiga aspek ini menjadi dasar dalam menilai kinerja organisasi secara menyeluruh. Dengan pendekatan ini, perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga keberlanjutan. Oleh karena itu, konsep ini menjadi fondasi penting dalam akuntansi keberlanjutan.

Dalam organisasi modern, akuntansi keberlanjutan juga berkaitan dengan konsep penciptaan nilai. Nilai perusahaan tidak hanya berasal dari aset finansial, tetapi juga dari aset sosial dan lingkungan. Eccles dan Krzus (2010) menekankan bahwa pelaporan harus mampu menjelaskan proses penciptaan nilai jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi harus mampu mencerminkan berbagai bentuk modal. Selain itu, pendekatan ini melahirkan berbagai metode seperti *environmental accounting* dan *social accounting*. Metode tersebut membantu perusahaan memahami dampaknya secara lebih luas. Dengan demikian, akuntansi keberlanjutan menjadi alat penting dalam menjelaskan value creation.

Dalam implementasinya, akuntansi keberlanjutan memerlukan indikator untuk mengukur kinerja perusahaan. Indikator tersebut meliputi emisi karbon, konsumsi energi, dan aspek sosial lainnya. Penggunaan indikator membantu perusahaan mengevaluasi

BAB 3

PERAN AKUNTANSI KEBERLANJUTAN DALAM STRATEGI BISNIS

3.1 Akuntansi sebagai Alat Pengambilan Keputusan Strategis

Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif dan dinamis, perusahaan dituntut untuk mampu mengambil keputusan strategis yang tepat dan berbasis informasi. Keputusan tersebut mencakup berbagai aspek penting seperti penentuan harga, pengendalian biaya, investasi, dan perencanaan jangka panjang. Setiap keputusan yang diambil akan memengaruhi posisi perusahaan dalam persaingan serta keberlanjutan usaha di masa depan. Oleh karena itu, proses pengambilan keputusan tidak dapat hanya mengandalkan intuisi, tetapi harus didukung oleh informasi yang andal. Dalam konteks ini, sistem akuntansi, khususnya akuntansi manajemen, memiliki peran penting sebagai penyedia informasi strategis. Menurut Horngren, Datar, dan Rajan (2015), akuntansi manajemen menyediakan informasi yang relevan untuk mendukung keputusan manajerial. Dengan demikian, akuntansi menjadi fondasi dalam proses pengambilan keputusan strategis.

Akuntansi manajemen berfungsi menyediakan informasi keuangan dan operasional yang relevan bagi manajemen dalam merencanakan, mengendalikan, serta mengevaluasi aktivitas organisasi. Informasi tersebut meliputi data biaya, anggaran, analisis varians, serta laporan kinerja yang membantu manajemen memahami kondisi perusahaan secara menyeluruh. Data yang dihasilkan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan dan strategi perusahaan. Dengan informasi yang akurat dan tepat waktu, manajemen dapat memilih alternatif strategi yang paling efektif. Saputra et al. (2025) menegaskan bahwa akuntansi manajemen tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai instrumen analitis. Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi memiliki peran strategis dalam organisasi modern. Oleh karena itu, kualitas informasi menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan.

Selain menyediakan data, akuntansi juga membantu manajemen menganalisis berbagai alternatif keputusan bisnis secara rasional. Informasi yang dihasilkan memungkinkan evaluasi terhadap berbagai pilihan strategi berdasarkan pertimbangan biaya dan manfaat. Proses ini membantu perusahaan memilih alternatif terbaik sesuai tujuan organisasi. Dengan demikian, akuntansi berfungsi sebagai alat untuk mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Anthony dan Govindarajan (2007) menyatakan bahwa informasi akuntansi mendukung evaluasi alternatif strategi secara

sistematis. Hal ini membuat keputusan menjadi lebih objektif dan terukur. Oleh karena itu, akuntansi memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas keputusan manajerial.

Dalam praktiknya, sistem akuntansi manajemen menyediakan berbagai alat analisis seperti analisis biaya relevan, analisis varians, margin kontribusi, serta analisis biaya-volume-laba. Alat-alat ini membantu manajemen memahami struktur biaya dan dampak keputusan terhadap kinerja perusahaan. Dengan analisis tersebut, manajer dapat mengevaluasi efisiensi operasional dan menentukan strategi yang paling menguntungkan. Penggunaan alat analisis ini juga membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya perusahaan. Purwanti dan Nurhayati (2025) menunjukkan bahwa penggunaan informasi akuntansi secara efektif meningkatkan efisiensi operasional. Dengan demikian, akuntansi manajemen menjadi alat penting dalam pengambilan keputusan strategis. Oleh karena itu, perusahaan perlu memanfaatkan sistem ini secara optimal.

Peran akuntansi semakin berkembang melalui konsep *strategic management accounting* yang memperluas fungsi akuntansi ke analisis lingkungan eksternal. Dalam pendekatan ini, informasi tidak hanya terbatas pada data internal perusahaan, tetapi juga mencakup analisis pesaing, tren pasar, dan dinamika industri. Hal ini memungkinkan perusahaan merumuskan strategi yang lebih kompetitif dan berorientasi jangka panjang. Putri (2025) menjelaskan bahwa *strategic management accounting* memperkuat posisi akuntansi sebagai alat strategis. Dengan cakupan analisis yang lebih luas, perusahaan dapat merespons perubahan lingkungan bisnis secara lebih efektif. Oleh karena itu, akuntansi menjadi alat penting dalam strategi kompetitif. Pendekatan ini menunjukkan bahwa akuntansi semakin berorientasi pada masa depan.

Selain itu, akuntansi juga berperan dalam mengintegrasikan informasi keuangan dan non-keuangan dalam pengambilan keputusan strategis. Informasi non-keuangan seperti kualitas produk, kepuasan pelanggan, serta dampak lingkungan semakin penting dalam perumusan strategi bisnis. Data tersebut melengkapi informasi keuangan yang selama ini menjadi fokus utama pelaporan tradisional. Dengan integrasi ini, manajemen memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kinerja perusahaan. Eccles dan Krzus (2010) menekankan pentingnya integrasi informasi dalam pengambilan keputusan strategis. Hal ini membantu perusahaan memahami risiko dan peluang secara lebih luas. Oleh karena itu, integrasi informasi menjadi elemen penting dalam akuntansi modern.

Dalam konteks bisnis modern, akuntansi tidak lagi dipandang hanya sebagai alat pencatatan transaksi keuangan. Sebaliknya, akuntansi berkembang menjadi sistem pendukung keputusan strategis yang penting bagi perusahaan. Melalui informasi yang relevan dan analisis yang komprehensif, akuntansi membantu perusahaan merumuskan strategi yang lebih efektif. Informasi tersebut memungkinkan manajemen memahami keterkaitan antara kinerja operasional dan kondisi pasar. Horngren et al. (2015) menegaskan bahwa fungsi analitis akuntansi menjadikannya alat utama dalam manajemen strategis.

BAB 4

AKUNTANSI HIJAU: KONSEP DAN PERKEMBANGAN

4.1 Konsep Green accounting

Dalam perkembangan dunia bisnis modern, aktivitas ekonomi perusahaan tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi, tetapi juga dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Aktivitas produksi, eksploitasi sumber daya alam, serta penggunaan teknologi industri sering kali berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan bisnis selalu memiliki konsekuensi yang lebih luas daripada sekadar perolehan keuntungan finansial. Karena itu, perusahaan membutuhkan sistem yang mampu menjelaskan hubungan antara aktivitas ekonomi dan dampak ekologis yang ditimbulkannya. Kebutuhan inilah yang kemudian melahirkan pendekatan akuntansi yang berupaya mengintegrasikan aspek ekonomi dan lingkungan dalam sistem pelaporan perusahaan. Gray, Bebbington, dan Walters (1993) menjelaskan bahwa akuntansi lingkungan berkembang sebagai respons terhadap meningkatnya kesadaran atas dampak ekologis aktivitas industri. Oleh karena itu, *green accounting* menjadi bagian penting dalam evolusi akuntansi modern.

Green accounting merupakan pendekatan akuntansi yang memasukkan aspek lingkungan ke dalam sistem pengukuran, pencatatan, dan pelaporan aktivitas perusahaan. Melalui pendekatan ini, perusahaan tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan dampak operasionalnya terhadap lingkungan dan masyarakat. Dengan demikian, akuntansi tidak lagi dipahami semata sebagai alat pelaporan keuangan, melainkan juga sebagai instrumen tanggung jawab lingkungan perusahaan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa informasi akuntansi harus berkembang sejalan dengan meningkatnya tuntutan terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan. Schaltegger dan Burritt (2010) menegaskan bahwa *environmental accounting* berfungsi mengintegrasikan informasi lingkungan ke dalam sistem informasi organisasi. Hal ini memperkuat gagasan bahwa *green accounting* merupakan perluasan peran akuntansi dalam mendukung keberlanjutan. Oleh karena itu, *green accounting* menjadi pendekatan yang relevan dalam konteks bisnis kontemporer.

Secara konseptual, *green accounting* dapat didefinisikan sebagai sistem akuntansi yang mengidentifikasi, mengukur, dan mengungkapkan biaya serta manfaat yang berkaitan dengan aktivitas lingkungan perusahaan. Konsep ini memungkinkan organisasi menilai sejauh mana aktivitas operasionalnya memberikan dampak positif maupun negatif terhadap

kualitas lingkungan hidup. Dengan adanya pengukuran tersebut, perusahaan dapat memahami secara lebih jelas konsekuensi lingkungan dari keputusan ekonomi yang diambil. Informasi ini penting agar manajemen tidak hanya mempertimbangkan hasil keuangan, tetapi juga mempertimbangkan implikasi ekologis dari operasional perusahaan. Kusumaningtias (2013) menjelaskan bahwa sistem ini membantu memperluas peran akuntansi dalam mendukung pengelolaan lingkungan secara lebih bertanggung jawab. Dengan kata lain, *green accounting* menghubungkan keputusan ekonomi dengan tanggung jawab ekologis. Oleh karena itu, konsep ini sangat penting dalam mendukung praktik bisnis berkelanjutan.

Dalam praktiknya, *green accounting* berfungsi untuk mengintegrasikan informasi mengenai biaya lingkungan ke dalam sistem akuntansi perusahaan sehingga manajemen dapat mengambil keputusan yang lebih bertanggung jawab. Informasi tersebut membantu perusahaan mengevaluasi aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan limbah, penggunaan energi, efisiensi sumber daya, dan perlindungan lingkungan. Biaya lingkungan yang sebelumnya tersembunyi atau tersebar dalam berbagai pos operasional dapat diidentifikasi secara lebih sistematis. Dengan begitu, perusahaan dapat melihat bahwa biaya lingkungan merupakan bagian nyata dari biaya operasional. United Nations (2001) menegaskan bahwa *environmental accounting* membantu perusahaan mengidentifikasi biaya lingkungan yang sering tersembunyi dalam sistem akuntansi konvensional. Hal ini membuat perusahaan lebih mampu mengelola biaya tersebut secara efektif. Oleh karena itu, *green accounting* membantu manajemen menghubungkan efisiensi ekonomi dengan tanggung jawab ekologis.

Selain sebagai alat manajemen internal, *green accounting* juga berperan dalam meningkatkan transparansi perusahaan kepada para pemangku kepentingan. Melalui pengungkapan informasi mengenai aktivitas lingkungan dalam laporan perusahaan, masyarakat dan investor dapat mengetahui sejauh mana perusahaan menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Informasi ini menjadi dasar penting bagi stakeholder dalam menilai komitmen perusahaan terhadap praktik bisnis berkelanjutan. Keterbukaan semacam itu juga dapat memperkuat legitimasi sosial perusahaan di mata publik. GRI (2021) menegaskan bahwa pengungkapan informasi lingkungan yang transparan dapat meningkatkan akuntabilitas perusahaan serta memperkuat kepercayaan publik. Dengan demikian, *green accounting* tidak hanya berfungsi sebagai alat internal. Oleh karena itu, *green accounting* juga menjadi sarana komunikasi eksternal yang strategis.

Deswanto (2022) menjelaskan bahwa *green accounting* merupakan mekanisme untuk mengendalikan dampak negatif aktivitas operasional perusahaan terhadap lingkungan melalui identifikasi, pencatatan, dan analisis transaksi yang berkaitan dengan aspek lingkungan. Informasi yang dihasilkan dari proses ini membantu organisasi mengambil keputusan strategis yang mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dengan kata lain, *green accounting* tidak sekadar berfungsi untuk mencatat biaya, tetapi juga membantu

BAB 5

PENGUKURAN DAN PENGAKUAN BIAYA LINGKUNGAN

5.1 Identifikasi Biaya Lingkungan

Dalam praktik akuntansi keberlanjutan, identifikasi biaya lingkungan merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses pengukuran dan pengakuan biaya yang berkaitan dengan aktivitas lingkungan perusahaan. Proses ini bertujuan untuk mengenali berbagai pengeluaran yang timbul akibat kegiatan operasional yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Tanpa identifikasi yang jelas, perusahaan akan kesulitan memahami besarnya sumber daya yang dialokasikan untuk pengelolaan dampak lingkungan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan biaya lingkungan tersembunyi di dalam berbagai pos biaya operasional lain. Menurut Kusumaningtias (2013), akuntansi lingkungan membantu memperluas fungsi akuntansi agar mampu menangkap konsekuensi ekologis dari aktivitas ekonomi. Dengan demikian, identifikasi biaya lingkungan menjadi fondasi penting dalam penerapan akuntansi lingkungan yang efektif. Oleh karena itu, tahap ini harus diposisikan sebagai bagian awal dari sistem pengelolaan lingkungan perusahaan.

Biaya lingkungan pada dasarnya merupakan biaya yang timbul akibat aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan upaya pencegahan, pengendalian, maupun pemulihan dampak lingkungan. Dalam konteks akuntansi lingkungan, biaya-biaya tersebut perlu diidentifikasi secara sistematis agar dapat dimasukkan ke dalam sistem pencatatan dan pelaporan perusahaan. Pengelompokan biaya yang jelas memungkinkan perusahaan memahami struktur biaya yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan. Informasi ini penting agar manajemen dapat mengevaluasi efektivitas kebijakan lingkungan yang diterapkan. Schaltegger dan Burritt (2010) menegaskan bahwa identifikasi biaya lingkungan merupakan bagian penting dalam membangun sistem informasi yang mendukung keputusan manajerial. Dengan demikian, sistem akuntansi lingkungan membantu perusahaan memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai pengeluaran yang berkaitan dengan tanggung jawab ekologisnya. Oleh karena itu, biaya lingkungan tidak boleh dipandang sebagai unsur tambahan yang terpisah dari biaya operasional inti.

Identifikasi biaya lingkungan menjadi semakin penting karena dalam praktik akuntansi konvensional banyak biaya terkait lingkungan tidak dicatat secara khusus. Biaya tersebut sering tercampur dalam pos biaya energi, bahan baku, pemeliharaan peralatan, atau overhead produksi. Akibatnya, perusahaan sering kali tidak menyadari besarnya biaya yang sebenarnya dikeluarkan untuk menangani dampak lingkungan dari kegiatan

operasionalnya. Kondisi ini dapat menyebabkan keputusan manajerial tidak mempertimbangkan konsekuensi ekologis secara memadai. Menurut United Nations (2001), banyak biaya lingkungan bersifat tersembunyi sehingga tidak terlihat secara jelas dalam sistem akuntansi tradisional. Dengan melakukan identifikasi secara sistematis, perusahaan dapat memisahkan biaya lingkungan dari biaya operasional lain dan menempatkannya dalam kategori yang lebih relevan. Oleh karena itu, akuntansi lingkungan menekankan pentingnya pengelompokan biaya lingkungan secara lebih terstruktur.

Dalam praktiknya, biaya lingkungan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori utama agar lebih mudah dianalisis dan dikendalikan. Salah satu klasifikasi yang paling umum adalah pembagian biaya menjadi biaya pencegahan, biaya deteksi, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Klasifikasi ini membantu perusahaan memahami jenis aktivitas lingkungan yang memerlukan alokasi biaya tertentu. Selain itu, pembagian tersebut memudahkan evaluasi atas efektivitas strategi pengelolaan lingkungan yang telah diterapkan. Burritt, Hahn, dan Schaltegger (2002) menunjukkan bahwa pengelompokan biaya lingkungan yang sistematis merupakan unsur penting dalam *environmental management accounting*. Dengan adanya klasifikasi seperti ini, perusahaan dapat mengetahui biaya mana yang bersifat preventif dan biaya mana yang muncul akibat kegagalan pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, klasifikasi biaya lingkungan menjadi kerangka kerja penting dalam pengendalian biaya ekologis perusahaan.

Biaya pencegahan merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan sebelum dampak tersebut benar-benar muncul. Contohnya meliputi biaya pengembangan teknologi ramah lingkungan, pelatihan karyawan mengenai pengelolaan lingkungan, serta biaya perencanaan sistem pengelolaan limbah. Investasi dalam biaya pencegahan biasanya dilakukan sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk menekan risiko lingkungan dan memperbaiki efisiensi operasional. Pendekatan ini umumnya dipandang lebih efisien daripada menanggung biaya akibat kerusakan lingkungan yang telah terjadi. Deswanto (2022) menegaskan bahwa mekanisme pengendalian dampak lingkungan sebaiknya dimulai dari proses identifikasi dan pencegahan yang baik. Dengan demikian, biaya pencegahan sering dipandang sebagai bentuk investasi dalam keberlanjutan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan yang serius menerapkan akuntansi lingkungan harus memberi perhatian besar pada kategori biaya ini.

Biaya deteksi merupakan biaya yang berkaitan dengan aktivitas pemantauan dan evaluasi kondisi lingkungan perusahaan. Contohnya meliputi biaya inspeksi lingkungan, pengujian kualitas air atau udara, serta audit lingkungan yang dilakukan secara berkala. Aktivitas deteksi bertujuan memastikan bahwa kegiatan operasional perusahaan telah memenuhi standar lingkungan yang berlaku. Melalui pemantauan yang sistematis, perusahaan dapat mengidentifikasi potensi masalah lingkungan sejak dini sebelum berkembang menjadi gangguan yang lebih besar. Menurut Schaltegger dan Burritt (2010), fungsi pengukuran dan pemantauan sangat penting dalam sistem informasi lingkungan

BAB 6

GREEN ACCOUNTING SEBAGAI STRATEGI EFISIENSI DAN NILAI TAMBAH

6.1 Eco-Efficiency dan Cleaner Production

Perkembangan konsep keberlanjutan dalam dunia bisnis mendorong perusahaan untuk mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam aktivitas operasionalnya. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam praktik akuntansi keberlanjutan adalah konsep *eco-efficiency*, yaitu strategi yang bertujuan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Pendekatan ini menekankan bahwa peningkatan kinerja ekonomi dapat berjalan seiring dengan peningkatan kinerja lingkungan. Dengan kata lain, perusahaan didorong untuk menghasilkan nilai ekonomi yang lebih tinggi dengan penggunaan sumber daya yang lebih sedikit dan dampak lingkungan yang lebih rendah. Menurut Sulistiawati dan Dirgantari (2023), *eco-efficiency* merupakan pendekatan yang menggabungkan efisiensi ekonomi dengan tanggung jawab lingkungan dalam aktivitas bisnis modern.

Secara konseptual, *eco-efficiency* menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya secara optimal dalam proses produksi. Perusahaan tidak hanya berfokus pada peningkatan output ekonomi, tetapi juga pada upaya meminimalkan penggunaan energi, bahan baku, serta emisi yang dihasilkan selama proses produksi. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas sumber daya sekaligus mengurangi tekanan terhadap lingkungan. Prinsip tersebut mendorong perusahaan untuk mengevaluasi kembali proses produksi yang digunakan agar lebih efisien dan berkelanjutan. Konsep ini pertama kali dipopulerkan oleh World Business Council for Sustainable Development sebagai strategi bisnis yang mampu menciptakan nilai ekonomi dengan dampak lingkungan yang lebih rendah (WBCSD, 2000).

Dalam perspektif akuntansi hijau, *eco-efficiency* berkaitan erat dengan pengukuran dan pengelolaan biaya lingkungan dalam sistem akuntansi perusahaan. Perusahaan tidak hanya memperhitungkan biaya produksi konvensional, tetapi juga mempertimbangkan biaya yang berkaitan dengan penggunaan energi, pengelolaan limbah, serta dampak lingkungan lainnya. Informasi mengenai biaya lingkungan memungkinkan perusahaan mengidentifikasi area produksi yang memiliki potensi pemborosan sumber daya. Dengan demikian, manajemen dapat merancang strategi operasional yang lebih efisien dan berkelanjutan. Irwan (2026) menjelaskan bahwa pengukuran biaya lingkungan merupakan

komponen penting dalam meningkatkan efisiensi operasional serta mendukung praktik akuntansi keberlanjutan.

Secara analitis, eco-efficiency sering dipahami sebagai rasio antara nilai ekonomi yang dihasilkan dengan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh suatu aktivitas ekonomi. Semakin besar nilai ekonomi yang dihasilkan dengan penggunaan sumber daya yang lebih sedikit dan dampak lingkungan yang lebih kecil, maka semakin tinggi tingkat eco-efficiency suatu organisasi. Pendekatan ini menuntut perusahaan untuk mengintegrasikan analisis ekonomi dan analisis lingkungan secara bersamaan dalam proses pengambilan keputusan. Evaluasi terhadap proses produksi tidak hanya dilakukan dari perspektif biaya, tetapi juga dari perspektif dampak lingkungan yang dihasilkan. Schaltegger dan Sturm (1990) menyatakan bahwa eco-efficiency merupakan indikator penting untuk menilai kinerja keberlanjutan suatu perusahaan.

Eco-efficiency juga mendorong perusahaan untuk melakukan inovasi dalam desain produk dan proses produksi. Inovasi tersebut dapat mencakup pengurangan penggunaan bahan baku, penggantian material berbahaya dengan material yang lebih ramah lingkungan, serta pengembangan teknologi produksi yang lebih hemat energi. Melalui inovasi tersebut, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas sumber daya sekaligus menurunkan dampak lingkungan yang dihasilkan. Inovasi berbasis lingkungan juga sering kali menghasilkan efisiensi biaya produksi dalam jangka panjang. Porter dan van der Linde (1995) menegaskan bahwa peningkatan kinerja lingkungan dapat mendorong inovasi teknologi yang pada akhirnya meningkatkan daya saing perusahaan di pasar global.

Selain eco-efficiency, pendekatan lain yang penting dalam pengelolaan lingkungan perusahaan adalah konsep *cleaner production*. Konsep ini menekankan strategi pencegahan pencemaran melalui peningkatan efisiensi penggunaan bahan baku, energi, dan air dalam proses produksi. Pendekatan ini berbeda dengan metode tradisional yang hanya berfokus pada pengolahan limbah setelah dihasilkan. Cleaner production menekankan pencegahan pencemaran sejak tahap awal proses produksi sehingga dampak lingkungan dapat diminimalkan secara lebih efektif. United Nations Environment Programme (UNEP, 2001) mendefinisikan cleaner production sebagai strategi pencegahan pencemaran yang dilakukan secara terpadu dalam seluruh proses produksi.

Pendekatan cleaner production mendorong perusahaan untuk mengadopsi teknologi dan proses produksi yang lebih ramah lingkungan. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai langkah seperti penggunaan bahan baku yang lebih efisien, pengurangan konsumsi energi, serta pemanfaatan kembali limbah produksi sebagai sumber daya alternatif. Strategi tersebut tidak hanya mengurangi dampak lingkungan tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Dengan mengurangi limbah dan emisi, perusahaan dapat menekan biaya pengelolaan lingkungan serta meningkatkan produktivitas sumber daya. Fadhlilah Syarthony (2023) menjelaskan bahwa penerapan cleaner production mampu meningkatkan efisiensi produksi sekaligus mengurangi tekanan terhadap lingkungan.

BAB 7

ESG DAN KERANGKA PELAPORAN KEBERLANJUTAN

7.1 Konsep Environmental, Social, Governance (ESG)

Environmental, Social, and Governance (ESG) merupakan kerangka evaluasi yang digunakan untuk menilai kinerja keberlanjutan perusahaan berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Konsep ini berkembang sebagai respons terhadap meningkatnya perhatian masyarakat, regulator, dan investor terhadap dampak aktivitas bisnis terhadap lingkungan dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks akuntansi keberlanjutan, ESG berfungsi sebagai pendekatan yang mengintegrasikan faktor non-keuangan ke dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Melalui kerangka ESG, perusahaan tidak hanya menilai kinerja finansial, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana aktivitas operasionalnya memengaruhi lingkungan dan masyarakat. Surya et al. (2025) menjelaskan bahwa ESG menjadi indikator penting dalam mengevaluasi keberlanjutan bisnis dan stabilitas kinerja perusahaan dalam jangka panjang.

Secara umum, ESG digunakan untuk menilai bagaimana perusahaan mengelola risiko dan peluang yang berkaitan dengan keberlanjutan. Penilaian ini mencakup kemampuan perusahaan dalam mengelola dampak lingkungan, menjaga hubungan sosial dengan pemangku kepentingan, serta menerapkan praktik tata kelola yang transparan dan akuntabel. Pendekatan ini memungkinkan investor dan pemangku kepentingan memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai stabilitas operasional perusahaan. Selain itu, penilaian ESG juga membantu perusahaan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dalam pengelolaan keberlanjutan. Surya et al. (2025) menyatakan bahwa kerangka ESG memberikan panduan strategis bagi perusahaan dalam mengelola risiko keberlanjutan secara sistematis.

Komponen pertama dalam kerangka ESG adalah aspek *Environmental*, yang berkaitan dengan dampak aktivitas perusahaan terhadap lingkungan. Aspek ini mencakup berbagai isu seperti pengelolaan emisi gas rumah kaca, penggunaan energi dan air, pengelolaan limbah, serta perlindungan terhadap keanekaragaman hayati. Perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan yang baik biasanya menerapkan strategi pengurangan emisi, efisiensi energi, serta pengelolaan sumber daya yang lebih berkelanjutan. Pengelolaan aspek lingkungan menjadi penting karena aktivitas bisnis sering kali berkontribusi terhadap perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Surya et al. (2025) menjelaskan bahwa

pengelolaan dampak lingkungan secara bertanggung jawab merupakan komponen utama dalam penilaian kinerja ESG perusahaan.

Komponen kedua adalah aspek *Social*, yang berkaitan dengan hubungan perusahaan dengan berbagai pemangku kepentingan. Aspek ini mencakup isu-isu seperti kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan hak asasi manusia, keberagaman dan inklusi, serta tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat. Perusahaan yang mampu mengelola aspek sosial dengan baik biasanya memiliki hubungan yang lebih harmonis dengan karyawan, konsumen, serta komunitas lokal. Hubungan sosial yang positif juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Dalam perspektif keberlanjutan, dimensi sosial menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas operasional perusahaan dalam jangka panjang.

Komponen ketiga dalam ESG adalah aspek *Governance*, yang berkaitan dengan sistem tata kelola perusahaan. Aspek ini mencakup struktur kepemimpinan, transparansi pelaporan keuangan, etika bisnis, serta mekanisme pengawasan internal perusahaan. Tata kelola yang baik memastikan bahwa perusahaan dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Sistem tata kelola yang kuat juga membantu perusahaan dalam mencegah praktik korupsi serta meningkatkan kepercayaan investor. Oleh karena itu, aspek governance menjadi elemen penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas perusahaan.

Perkembangan konsep ESG tidak terlepas dari meningkatnya kesadaran global terhadap pentingnya integrasi antara kinerja ekonomi, tanggung jawab sosial, dan perlindungan lingkungan. Dalam beberapa dekade terakhir, lembaga keuangan, investor institusional, serta organisasi internasional semakin menekankan pentingnya keberlanjutan dalam aktivitas bisnis. Perusahaan tidak lagi dinilai hanya berdasarkan keuntungan finansial, tetapi juga berdasarkan dampak sosial dan lingkungan yang dihasilkan dari operasionalnya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan telah menjadi faktor penting dalam menilai kualitas manajemen perusahaan. Integrasi ESG dalam strategi bisnis mencerminkan perubahan paradigma menuju model ekonomi yang lebih berkelanjutan. Istilah ESG mulai memperoleh perhatian luas setelah diperkenalkan dalam laporan *"Who Cares Wins"* yang diterbitkan oleh United Nations Global Compact pada tahun 2004. Laporan tersebut menekankan bahwa integrasi faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam analisis investasi dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan investasi. Selain itu, pendekatan ESG juga diyakini dapat menciptakan pasar keuangan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Dengan mempertimbangkan faktor ESG, investor dapat menilai risiko non-keuangan yang mungkin memengaruhi kinerja perusahaan di masa depan. UN Global Compact (2004) menegaskan bahwa integrasi ESG merupakan langkah penting dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih bertanggung jawab.

Dalam konteks investasi berkelanjutan, ESG sering digunakan untuk mengevaluasi berbagai risiko non-keuangan yang dapat mempengaruhi stabilitas perusahaan. Risiko

BAB 8

GOVERNANCE SEBAGAI FONDASI STRATEGI KEBERLANJUTAN

8.1 Prinsip Good Corporate governance

Good Corporate governance (GCG) merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Konsep ini menekankan pentingnya tata kelola yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab agar perusahaan dapat dikelola secara sehat dan berkelanjutan. Dalam pengertian yang lebih luas, *corporate governance* juga mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen, dewan komisaris, kreditur, serta pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Dengan demikian, tata kelola perusahaan bukan hanya persoalan struktur organisasi, tetapi juga mekanisme yang memastikan bahwa kekuasaan korporasi digunakan secara tepat. Emirzon (2006) menjelaskan bahwa *corporate governance* merupakan sistem yang mengatur hubungan antarorgan perusahaan dan para pemangku kepentingan untuk menjaga keseimbangan hak, kewajiban, serta akuntabilitas.

Dalam perspektif tata kelola modern, penerapan GCG tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan terhadap manajemen, tetapi juga sebagai alat untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola secara profesional dan berintegritas. Tata kelola yang baik membantu perusahaan mengurangi risiko penyimpangan, memperkuat sistem pengendalian, dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Dengan adanya GCG, perusahaan tidak hanya dituntut mencapai laba, tetapi juga menjalankan kegiatan usahanya secara etis dan bertanggung jawab. Hal ini menjadikan GCG sebagai elemen yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Kaihatu (2006) menegaskan bahwa *corporate governance* merupakan sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mampu menciptakan nilai tambah bagi seluruh stakeholder melalui pengelolaan yang bertanggung jawab.

Prinsip-prinsip *Good Corporate governance* pada umumnya terdiri atas lima unsur utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Kelima prinsip ini menjadi pedoman dasar dalam mengelola perusahaan secara profesional dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dalam membentuk tata kelola perusahaan yang sehat. Ketika satu prinsip diabaikan, efektivitas prinsip lainnya juga dapat melemah. Emirzon (2006) menjelaskan bahwa lima prinsip GCG tersebut merupakan fondasi utama bagi terciptanya tata kelola perusahaan

yang mampu menjawab tuntutan efisiensi, kepercayaan, dan legitimasi dalam dunia bisnis modern.

Prinsip pertama adalah transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan perusahaan dalam menyampaikan informasi yang relevan kepada para pemangku kepentingan. Informasi mengenai kondisi keuangan, kinerja operasional, struktur kepemilikan, serta kebijakan strategis harus disampaikan secara akurat, jelas, dan tepat waktu. Transparansi penting untuk mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemilik modal, sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap perusahaan. Dalam praktiknya, transparansi juga mencakup penyampaian informasi non-keuangan, seperti kinerja keberlanjutan dan risiko bisnis jangka panjang. Menurut Suwandi, Arifianti, dan Rizal (2018), transparansi merupakan prasyarat penting bagi terciptanya kepercayaan pasar terhadap perusahaan.

Prinsip kedua adalah akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, struktur, peran, dan mekanisme pertanggungjawaban dalam perusahaan. Setiap organ perusahaan, termasuk direksi dan dewan komisaris, harus memiliki tugas dan otoritas yang jelas agar pengelolaan perusahaan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Akuntabilitas memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh manajemen dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Prinsip ini juga mendorong perusahaan membangun sistem evaluasi dan pengawasan yang dapat menilai kinerja manajerial secara objektif. Suwandi et al. (2018) menekankan bahwa akuntabilitas merupakan inti dari tata kelola yang efektif karena menentukan sejauh mana kekuasaan dalam perusahaan dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan.

Prinsip ketiga adalah tanggung jawab (*responsibility*), yang mengharuskan perusahaan menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta norma etika yang berlaku. Tanggung jawab ini tidak hanya terbatas pada kepatuhan hukum, tetapi juga mencakup perhatian terhadap dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas operasional perusahaan. Dengan demikian, perusahaan tidak dapat memisahkan pencapaian ekonomi dari kewajiban sosial dan ekologisnya. Prinsip tanggung jawab menempatkan perusahaan sebagai entitas ekonomi yang juga memiliki fungsi sosial dalam masyarakat. Emirzon (2006) menjelaskan bahwa tanggung jawab merupakan prinsip yang menekankan pentingnya kepatuhan perusahaan terhadap hukum sekaligus komitmen terhadap keberlanjutan.

Prinsip keempat adalah independensi (*independency*), yaitu pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa adanya tekanan, intervensi, atau konflik kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitas pengambilan keputusan. Prinsip ini sangat penting agar organ perusahaan dapat menjalankan fungsinya secara jujur dan tidak memihak. Independensi terutama berkaitan dengan peran dewan komisaris, komite audit, dan fungsi pengawasan lainnya dalam menjaga keseimbangan kekuasaan manajerial. Tanpa independensi, tata kelola berisiko menjadi formalitas belaka karena keputusan dapat dikendalikan oleh kepentingan tertentu. Budiarti (2010) menegaskan bahwa independensi merupakan syarat

BAB 9

MANAJEMEN RISIKO DAN PENGENDALIAN INTERNAL BERBASIS ESG

9.1 Risiko Lingkungan dan Sosial

Dalam perkembangan bisnis modern, perusahaan tidak hanya menghadapi risiko keuangan dan operasional, tetapi juga risiko yang berkaitan dengan aspek lingkungan dan sosial. Risiko-risiko tersebut menjadi semakin penting karena regulator, investor, dan masyarakat kini menilai perusahaan tidak hanya dari kinerja finansial, tetapi juga dari cara perusahaan mengelola dampak eksternal dari aktivitas bisnisnya. Dalam kerangka *Environmental, Social, and Governance* (ESG), risiko lingkungan dan sosial dipahami sebagai bagian dari risiko strategis yang dapat memengaruhi keberlanjutan usaha. Dengan demikian, pengelolaan risiko ESG tidak lagi bersifat tambahan, melainkan menjadi bagian integral dari sistem tata kelola dan manajemen perusahaan. Menurut Putra dan Setiawan (2026), risiko lingkungan dan sosial harus diposisikan sebagai komponen penting dalam strategi keberlanjutan perusahaan karena keduanya memiliki implikasi langsung terhadap kinerja dan legitimasi organisasi.

Risiko lingkungan berkaitan dengan dampak kegiatan operasional perusahaan terhadap kondisi lingkungan hidup, seperti pencemaran udara, pencemaran air, pengelolaan limbah yang tidak memadai, serta eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Risiko ini dapat muncul baik dari aktivitas produksi yang intensif sumber daya maupun dari kegagalan perusahaan dalam memenuhi standar lingkungan yang berlaku. Jika risiko lingkungan tidak dikelola secara efektif, perusahaan dapat menghadapi sanksi regulasi, kenaikan biaya kepatuhan, kerusakan aset, hingga penurunan reputasi di mata publik. Selain itu, risiko lingkungan sering memiliki efek jangka panjang yang melampaui periode akuntansi biasa, sehingga memerlukan pendekatan manajerial yang lebih antisipatif. Putra dan Setiawan (2026) menegaskan bahwa pengelolaan risiko lingkungan harus diintegrasikan ke dalam sistem manajemen perusahaan agar tidak menimbulkan beban ekonomi dan reputasional di masa depan.

Selain risiko lingkungan, perusahaan juga menghadapi risiko sosial yang berkaitan dengan hubungan perusahaan dengan masyarakat, tenaga kerja, konsumen, dan pemangku kepentingan lainnya. Risiko sosial dapat muncul dalam bentuk konflik dengan masyarakat sekitar, pelanggaran hak tenaga kerja, praktik diskriminatif, masalah keselamatan kerja, maupun ketidakpuasan konsumen terhadap produk dan layanan perusahaan. Bila risiko ini tidak dikelola dengan baik, perusahaan dapat menghadapi gangguan operasional,

penurunan kepercayaan publik, boikot konsumen, hingga melemahnya legitimasi sosial. Dalam banyak kasus, risiko sosial berkembang bukan hanya karena tindakan perusahaan, tetapi juga karena kegagalan perusahaan membangun komunikasi dan relasi yang sehat dengan stakeholder. Herlandi Putra et al. (2026) menunjukkan bahwa pengelolaan risiko sosial yang lemah dapat berdampak langsung terhadap stabilitas bisnis dan keberlanjutan hubungan perusahaan dengan masyarakat.

Dalam kerangka ESG, risiko lingkungan dan sosial tidak dipandang sebagai isu yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari risiko korporasi yang harus diidentifikasi, dipetakan, dan dikelola secara sistematis. ESG berfungsi tidak hanya sebagai kerangka evaluasi kinerja keberlanjutan, tetapi juga sebagai alat untuk mengenali berbagai sumber risiko yang timbul dari interaksi perusahaan dengan lingkungan alam dan sosialnya. Dengan menerapkan prinsip ESG secara konsisten, perusahaan dapat meningkatkan kemampuannya dalam mengantisipasi perubahan regulasi, tekanan pasar, tuntutan masyarakat, serta perubahan preferensi investor. Pendekatan ini membuat perusahaan lebih siap menghadapi lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian. Menurut Herlandi Putra et al. (2026), integrasi ESG dalam sistem pengelolaan risiko membantu perusahaan meningkatkan ketahanan organisasi terhadap tekanan eksternal.

Dalam literatur manajemen risiko modern, risiko lingkungan dan sosial semakin dipandang sebagai bagian integral dari *enterprise risk management* (ERM). Pendekatan ERM menekankan bahwa perusahaan harus mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola seluruh jenis risiko secara terintegrasi, termasuk risiko yang berasal dari dampak lingkungan dan sosial aktivitas bisnis. Integrasi ini penting karena berbagai risiko keberlanjutan dapat memiliki implikasi langsung terhadap arus kas, biaya modal, reputasi, dan keberlangsungan operasi perusahaan. Dengan kata lain, risiko ESG tidak boleh dipisahkan dari proses pengambilan keputusan strategis perusahaan. Lam (2014) menjelaskan bahwa pendekatan ERM yang komprehensif harus mampu mengakomodasi risiko nonkeuangan karena justru di situlah banyak ancaman jangka panjang perusahaan berasal.

Risiko lingkungan sering kali berkaitan erat dengan perubahan regulasi yang semakin ketat terkait perlindungan lingkungan. Peningkatan aturan mengenai emisi karbon, pengelolaan limbah industri, penggunaan energi, dan efisiensi sumber daya dapat memengaruhi struktur biaya perusahaan secara signifikan. Perusahaan yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi tersebut akan menghadapi biaya kepatuhan yang lebih tinggi, sanksi administratif, atau pembatasan operasional. Karena itu, risiko lingkungan bukan hanya persoalan ekologis, tetapi juga persoalan ekonomi dan strategis. Menurut Lam (2014), risiko regulasi merupakan salah satu kanal utama yang menghubungkan isu keberlanjutan dengan kinerja keuangan perusahaan.

Selain regulasi, perubahan iklim juga menjadi salah satu sumber utama risiko lingkungan bagi perusahaan. Perubahan pola cuaca ekstrem, kenaikan permukaan laut,

BAB 10

IMPLEMENTASI AKUNTANSI KEBERLANJUTAN DALAM ORGANISASI

10.1 Strategi Integrasi dalam Struktur Organisasi

Implementasi akuntansi keberlanjutan dalam organisasi tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus diintegrasikan secara sistematis ke dalam struktur organisasi. Integrasi ini bertujuan agar prinsip keberlanjutan menjadi bagian dari proses manajemen, pengambilan keputusan strategis, serta aktivitas operasional perusahaan. Tanpa integrasi struktural, praktik keberlanjutan sering kali hanya bersifat simbolik atau terbatas pada kegiatan pelaporan. Oleh karena itu, organisasi yang berhasil menerapkan akuntansi keberlanjutan biasanya melakukan penyesuaian struktur organisasi, memperkuat koordinasi antarunit kerja, serta menempatkan keberlanjutan sebagai bagian dari sistem tata kelola perusahaan. Schaltegger, Burritt, dan Petersen (2017) menegaskan bahwa integrasi keberlanjutan dalam struktur organisasi merupakan prasyarat penting agar praktik akuntansi keberlanjutan dapat berfungsi secara efektif dalam pengambilan keputusan bisnis.

Dalam konteks keberlanjutan modern, konsep *Environmental, Social, and Governance* (ESG) menjadi kerangka penting yang mengarahkan perusahaan untuk mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam aktivitas bisnis. ESG tidak hanya dipandang sebagai kewajiban regulasi atau strategi reputasi, tetapi juga sebagai pendekatan manajemen yang membantu perusahaan memahami risiko dan peluang jangka panjang. Penerapan ESG memungkinkan organisasi menilai dampak operasionalnya terhadap berbagai pemangku kepentingan serta lingkungan secara lebih komprehensif. Dengan demikian, ESG berfungsi sebagai kerangka kerja strategis yang menghubungkan kinerja ekonomi dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Menurut Ramadhanti et al. (2025), integrasi ESG dalam strategi perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap keberlanjutan organisasi dan menjadi salah satu faktor penting dalam pertimbangan investor.

Seiring meningkatnya kesadaran global terhadap isu keberlanjutan, perusahaan dituntut untuk menyesuaikan struktur organisasinya agar mampu mengelola dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Struktur organisasi yang adaptif memungkinkan perusahaan mengintegrasikan keberlanjutan dalam berbagai fungsi manajerial seperti perencanaan, operasional, manajemen risiko, dan pelaporan. Penyesuaian ini penting karena pengelolaan keberlanjutan membutuhkan koordinasi lintas fungsi yang tidak dapat dilakukan secara terpisah oleh satu unit saja. Selain itu, struktur organisasi yang

mendukung keberlanjutan juga membantu memperkuat hubungan perusahaan dengan pemangku kepentingan, termasuk investor, konsumen, dan masyarakat. Ramadhanti et al. (2025) menjelaskan bahwa integrasi ESG dalam struktur organisasi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam mengelola dampak sosial dan lingkungan.

Strategi integrasi keberlanjutan dalam struktur organisasi juga berkaitan erat dengan pengelolaan risiko perusahaan. Dalam pendekatan *Enterprise Risk Management* (ERM), organisasi perlu mengidentifikasi, mengevaluasi, serta merespons berbagai risiko yang dapat memengaruhi kinerja bisnis dan keberlanjutan perusahaan. Risiko tersebut tidak hanya mencakup risiko keuangan, tetapi juga risiko lingkungan, sosial, dan reputasi yang dapat memengaruhi stabilitas organisasi. Dengan memasukkan aspek keberlanjutan dalam kerangka ERM, perusahaan dapat mengelola ketidakpastian secara lebih sistematis. Nurkasya (2024) menunjukkan bahwa penerapan ERM memiliki pengaruh positif terhadap kinerja bisnis berkelanjutan karena membantu organisasi memperkuat pengelolaan risiko melalui lingkungan internal, komunikasi informasi, serta proses pemantauan risiko.

Dalam praktiknya, ERM biasanya mencakup beberapa tahapan penting, seperti penetapan tujuan organisasi, identifikasi kejadian yang berpotensi menimbulkan risiko, penilaian risiko, penanganan risiko, serta aktivitas pengendalian dan pemantauan. Melalui tahapan tersebut, organisasi dapat memastikan bahwa setiap keputusan bisnis mempertimbangkan aspek risiko secara menyeluruh. Pendekatan ini membantu perusahaan menjaga stabilitas operasional sekaligus mengantisipasi potensi gangguan terhadap keberlanjutan bisnis. Selain itu, ERM memungkinkan manajemen memahami hubungan antara risiko keberlanjutan dengan kinerja ekonomi perusahaan. Menurut Nurkasya (2024), pengelolaan risiko yang terintegrasi merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan strategi keberlanjutan organisasi.

Selain manajemen risiko, integrasi keberlanjutan dalam struktur organisasi juga membutuhkan sistem pengawasan internal yang kuat. Sistem pengendalian internal berperan penting dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Pengendalian internal yang efektif membantu organisasi menjaga kepatuhan terhadap regulasi sekaligus meningkatkan efisiensi operasional. Salah satu bentuk pengendalian tersebut adalah penyusunan *Standard Operating Procedures* (SOP) yang jelas serta pembentukan unit pengawasan internal yang bertugas melakukan audit, evaluasi, dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi. Aresteria (2018) menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal yang baik merupakan fondasi penting dalam menjaga integritas organisasi dan mencegah terjadinya penyimpangan.

Audit internal yang dilakukan secara sistematis dapat membantu organisasi mendeteksi potensi penyimpangan, termasuk tindakan fraud, serta memastikan bahwa aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Selain fungsi pengawasan, audit internal juga memberikan rekomendasi perbaikan yang bertujuan

BAB 11

AKUNTANSI KEBERLANJUTAN DAN INVESTASI BERBASIS ESG

11.1 Sustainable Finance

Sustainable finance merupakan konsep pembiayaan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam proses pengambilan keputusan keuangan. Konsep ini bertujuan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dengan memastikan bahwa kegiatan pembiayaan tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat. Dalam konteks ini, sektor keuangan memiliki peran strategis dalam mengarahkan aliran modal menuju aktivitas ekonomi yang lebih berkelanjutan. Perkembangan konsep *sustainable finance* semakin penting seiring meningkatnya kesadaran global terhadap isu perubahan iklim, kerusakan lingkungan, serta ketimpangan sosial. Menurut Schoenmaker dan Schramade (2019), *sustainable finance* merupakan pendekatan sistem keuangan yang mengintegrasikan pertimbangan keberlanjutan dalam keputusan investasi dan pembiayaan untuk mendukung pembangunan jangka panjang.

Sustainable finance sering dikaitkan dengan integrasi faktor *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam aktivitas investasi dan pembiayaan. Pendekatan ini menekankan bahwa keputusan keuangan tidak hanya didasarkan pada kinerja finansial perusahaan, tetapi juga pada bagaimana perusahaan mengelola dampak lingkungan, tanggung jawab sosial, serta praktik tata kelola yang baik. Dengan mempertimbangkan faktor ESG, investor dapat menilai risiko dan peluang bisnis secara lebih komprehensif. Selain itu, integrasi ESG juga membantu meningkatkan transparansi serta akuntabilitas perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Friede, Busch, dan Bassen (2015) menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki kinerja ESG yang baik cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih stabil dalam jangka panjang.

Dalam praktiknya, *sustainable finance* berperan penting dalam mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik bisnis yang lebih berkelanjutan. Perusahaan yang menerapkan prinsip keberlanjutan biasanya memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola risiko jangka panjang, terutama risiko yang berkaitan dengan perubahan regulasi, reputasi, dan dampak lingkungan. Selain itu, perusahaan yang memiliki komitmen terhadap keberlanjutan juga cenderung memperoleh kepercayaan yang lebih besar dari investor dan pemangku kepentingan. Kondisi ini dapat meningkatkan akses perusahaan terhadap sumber pembiayaan yang lebih luas. Schoenmaker dan Schramade (2019) menjelaskan

bahwa integrasi keberlanjutan dalam sistem keuangan dapat membantu menciptakan stabilitas ekonomi jangka panjang.

Sustainable finance juga berkaitan erat dengan penyusunan *sustainability report*. Melalui laporan keberlanjutan, perusahaan dapat menyampaikan informasi mengenai kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan kepada para investor dan pemangku kepentingan lainnya. Informasi tersebut dapat digunakan oleh investor sebagai dasar dalam mengambil keputusan investasi yang lebih bertanggung jawab. Dengan adanya transparansi informasi mengenai praktik keberlanjutan perusahaan, investor dapat menilai sejauh mana perusahaan mengelola risiko serta peluang yang berkaitan dengan isu lingkungan dan sosial. Herawaty et al. (2021) menyatakan bahwa *sustainability report* memberikan informasi yang lebih komprehensif kepada pemangku kepentingan karena laporan tersebut tidak hanya menyajikan informasi finansial, tetapi juga mengungkapkan aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan lingkungan dan sosial.

Selain meningkatkan transparansi perusahaan, *sustainable finance* juga dapat mendorong peningkatan kualitas tata kelola perusahaan. Perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik akan lebih mampu mengelola risiko serta menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tata kelola perusahaan yang kuat juga membantu meningkatkan kepercayaan investor terhadap integritas manajemen perusahaan. Dengan demikian, penerapan prinsip keberlanjutan dalam sistem keuangan dapat berkontribusi terhadap peningkatan stabilitas dan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Schoenmaker dan Schramade (2019) menjelaskan bahwa integrasi ESG dalam sistem tata kelola perusahaan merupakan salah satu elemen penting dalam pengembangan sistem keuangan berkelanjutan.

Dalam konteks pembangunan global, *sustainable finance* memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Melalui alokasi dana yang lebih bertanggung jawab, lembaga keuangan dapat membantu mendukung berbagai program yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Investasi yang diarahkan pada sektor-sektor berkelanjutan dapat mempercepat pencapaian berbagai target pembangunan global. Oleh karena itu, sistem keuangan memiliki peran penting sebagai penggerak utama dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan. United Nations (2015) menegaskan bahwa mobilisasi pembiayaan yang berkelanjutan merupakan faktor kunci dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Meskipun memiliki banyak manfaat, penerapan *sustainable finance* juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman mengenai integrasi faktor keberlanjutan dalam keputusan keuangan. Banyak pelaku pasar masih menganggap faktor lingkungan dan sosial sebagai isu non-finansial yang tidak memiliki dampak signifikan terhadap kinerja investasi. Selain itu, keterbatasan data mengenai kinerja keberlanjutan perusahaan juga dapat menyulitkan investor dalam melakukan evaluasi

BAB 12

PERAN REGULASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK

12.1 Regulasi Nasional dan Internasional

Regulasi dan kebijakan publik memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong implementasi akuntansi keberlanjutan serta praktik bisnis yang berorientasi pada *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Pemerintah dan lembaga internasional berperan dalam menetapkan kerangka hukum, standar, dan pedoman yang mengarahkan organisasi untuk mengintegrasikan aspek keberlanjutan ke dalam strategi bisnis dan pelaporan perusahaan. Regulasi tersebut tidak hanya bertujuan untuk melindungi lingkungan dan masyarakat, tetapi juga untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Dengan adanya kerangka regulasi yang jelas, perusahaan didorong untuk mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dalam setiap aktivitas bisnis yang dilakukan. Schoenmaker dan Schramade (2019) menjelaskan bahwa kebijakan publik memainkan peran penting dalam membentuk sistem keuangan dan praktik bisnis yang berorientasi pada keberlanjutan.

Secara global, berbagai organisasi internasional telah mengembangkan kerangka regulasi dan standar yang mendukung praktik keberlanjutan dalam dunia bisnis. Salah satu konsep penting yang banyak digunakan sebagai dasar kebijakan keberlanjutan adalah *Triple Bottom Line* (TBL), yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam aktivitas bisnis. Konsep ini mendorong perusahaan untuk tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial semata, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan operasionalnya. Dengan demikian, keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur berdasarkan kinerja ekonomi, tetapi juga berdasarkan kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Elkington (1997) menjelaskan bahwa pendekatan *Triple Bottom Line* menjadi dasar penting dalam pengembangan praktik bisnis berkelanjutan.

Salah satu kerangka kebijakan internasional yang paling berpengaruh dalam mendorong pembangunan berkelanjutan adalah *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang diperkenalkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). SDGs terdiri dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan global seperti kemiskinan, perubahan iklim, ketimpangan sosial, serta degradasi lingkungan. Banyak negara dan perusahaan menggunakan SDGs sebagai acuan dalam merancang kebijakan pembangunan dan strategi bisnis yang berorientasi pada keberlanjutan. Dengan mengintegrasikan tujuan-tujuan tersebut dalam kebijakan publik dan praktik bisnis, pemerintah dan sektor swasta dapat bekerja sama dalam mencapai pembangunan ekonomi

yang lebih inklusif dan berkelanjutan. United Nations (2015) menyatakan bahwa SDGs merupakan kerangka global yang dirancang untuk mendorong pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030.

Selain SDGs, terdapat beberapa standar internasional yang banyak digunakan dalam praktik pelaporan keberlanjutan perusahaan. Salah satu standar yang paling dikenal adalah *Global Reporting Initiative* (GRI), yang menyediakan pedoman bagi organisasi dalam menyusun laporan keberlanjutan yang transparan dan dapat dibandingkan secara global. Standar GRI membantu perusahaan dalam mengungkapkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari aktivitas bisnis mereka kepada para pemangku kepentingan. Dengan menggunakan standar ini, perusahaan dapat meningkatkan kualitas pelaporan keberlanjutan serta memperkuat kepercayaan investor dan masyarakat. Global Reporting Initiative (2021) menjelaskan bahwa standar GRI dirancang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi dalam mengelola dampak keberlanjutan.

Standar internasional lain yang sering digunakan dalam praktik keberlanjutan adalah ISO 14001 yang merupakan bagian dari sistem manajemen lingkungan. ISO 14001 memberikan kerangka kerja bagi organisasi untuk mengelola dampak lingkungan secara sistematis melalui pengendalian operasional, evaluasi kinerja lingkungan, serta penerapan prinsip peningkatan berkelanjutan. Dengan menerapkan standar ini, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, mengurangi limbah, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan yang berlaku. International Organization for Standardization (2015) menjelaskan bahwa ISO 14001 membantu organisasi mengelola tanggung jawab lingkungan secara lebih efektif dan terstruktur.

Di tingkat nasional, pemerintah di berbagai negara juga mengembangkan kebijakan dan regulasi yang mendukung penerapan praktik bisnis berkelanjutan. Regulasi nasional biasanya mencakup berbagai aspek seperti perlindungan lingkungan, pelaporan keberlanjutan perusahaan, serta pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah menggunakan berbagai instrumen kebijakan seperti peraturan perundang-undangan, insentif ekonomi, serta mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi standar keberlanjutan yang telah ditetapkan. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berupaya menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. OECD (2020) menjelaskan bahwa kebijakan publik memiliki peran penting dalam mengarahkan praktik bisnis menuju pembangunan berkelanjutan.

Di Indonesia, salah satu kebijakan penting yang mendukung praktik keberlanjutan adalah regulasi mengenai keuangan berkelanjutan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Regulasi ini mendorong lembaga keuangan dan perusahaan untuk mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial dalam kegiatan pembiayaan serta investasi. Melalui kebijakan tersebut, perusahaan diharapkan dapat mengintegrasikan prinsip ESG dalam pengambilan keputusan bisnis serta meningkatkan kualitas pelaporan keberlanjutan. Otoritas Jasa Keuangan (2017) menjelaskan bahwa implementasi keuangan

BAB 13

STUDI KASUS DAN PRAKTIK TERBAIK

13.1 Studi Kasus Perusahaan Nasional

Penerapan akuntansi keberlanjutan dan prinsip ESG pada perusahaan nasional di Indonesia menunjukkan perkembangan yang semakin signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Perusahaan mulai menyadari bahwa keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan tanggung jawab sosial, tetapi juga merupakan bagian strategis dalam menjaga stabilitas operasional, meningkatkan reputasi, serta memperkuat kepercayaan investor. Implementasi ini tercermin melalui penyusunan laporan keberlanjutan, penguatan tata kelola perusahaan, serta pengelolaan risiko lingkungan dan sosial secara sistematis. Transformasi ini menunjukkan bahwa keberlanjutan telah menjadi bagian integral dari sistem manajemen modern di Indonesia. Eccles, Ioannou, dan Serafeim (2014) menunjukkan bahwa perusahaan yang mengintegrasikan praktik keberlanjutan dalam strategi bisnis cenderung memiliki kinerja jangka panjang yang lebih baik.

Salah satu bentuk konkret penerapan keberlanjutan adalah integrasi prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam operasional dan pelaporan perusahaan. Penerapan ESG meningkatkan transparansi serta menyediakan informasi yang lebih komprehensif mengenai dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas bisnis. Selain itu, integrasi ini membantu perusahaan dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko yang berkaitan dengan aspek non-keuangan. Perkembangan ini juga didorong oleh tuntutan regulator dan investor yang semakin menekankan pentingnya praktik bisnis yang bertanggung jawab. Otoritas Jasa Keuangan (2017) menegaskan bahwa implementasi keuangan berkelanjutan, termasuk pelaporan ESG, merupakan bagian penting dalam memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional.

Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia semakin banyak yang menyusun laporan keberlanjutan sebagai bentuk akuntabilitas kepada pemangku kepentingan. Laporan ini berfungsi sebagai media komunikasi dalam menyampaikan kinerja ESG perusahaan. Namun, kualitas laporan masih bervariasi antarperusahaan, menunjukkan adanya perbedaan tingkat kesiapan dan pemahaman terhadap praktik keberlanjutan. Sebagian perusahaan telah mengadopsi standar internasional, sementara yang lain masih bersifat simbolik. Irsyani et al. (2025) menunjukkan bahwa kualitas laporan ESG di Indonesia sangat dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan dan tekanan dari pemangku kepentingan.

Variasi kualitas laporan tersebut menunjukkan bahwa implementasi ESG di Indonesia masih berada dalam tahap perkembangan. Regulasi saja belum cukup untuk menjamin kualitas pengungkapan ESG tanpa didukung oleh tata kelola yang baik, kapasitas internal

perusahaan, serta mekanisme verifikasi seperti *sustainability assurance*. Selain itu, kemampuan perusahaan dalam mengelola data keberlanjutan juga menjadi faktor penting. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas organisasi menjadi kunci dalam memperkuat implementasi akuntansi keberlanjutan. Irsyani et al. (2025) menegaskan bahwa faktor internal dan eksternal perusahaan berperan besar dalam menentukan kualitas pelaporan ESG.

Penerapan keberlanjutan juga berkaitan erat dengan upaya perusahaan dalam menjaga reputasi dan kepercayaan investor di pasar modal. Perusahaan dengan transparansi tinggi cenderung memperoleh kepercayaan lebih besar dari investor karena informasi yang tersedia memungkinkan penilaian yang lebih objektif. Sebaliknya, manipulasi laporan dapat merusak reputasi dan menurunkan stabilitas pasar. Kasus-kasus pelaporan yang tidak akurat menunjukkan dampak signifikan terhadap harga saham dan kepercayaan investor. Kosasih dan Astawa (2025) menegaskan bahwa transparansi dan integritas laporan merupakan faktor kunci dalam menjaga kredibilitas pasar modal.

Dalam praktiknya, perusahaan nasional mulai mengintegrasikan keberlanjutan dalam strategi bisnis melalui efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan program tanggung jawab sosial. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan bukan lagi aktivitas tambahan, melainkan bagian dari strategi penciptaan nilai jangka panjang. Integrasi ini juga meningkatkan daya saing perusahaan di pasar global. Perusahaan yang mampu mengelola dampak sosial dan lingkungan secara efektif cenderung memiliki reputasi lebih baik. Porter dan Kramer (2011) menjelaskan bahwa strategi keberlanjutan dapat menciptakan *shared value* bagi perusahaan dan masyarakat.

Perkembangan praktik keberlanjutan juga terlihat dari meningkatnya jumlah perusahaan yang menerbitkan *sustainability report* secara terpisah. Banyak perusahaan besar di sektor strategis mulai mengacu pada standar internasional seperti GRI dan TCFD. Laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai instrumen manajemen internal untuk mengidentifikasi dampak dan menetapkan target keberlanjutan. *Global Reporting Initiative* (GRI, 2021) menekankan bahwa pelaporan keberlanjutan yang terstruktur membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan.

Dalam sektor perbankan, implementasi keberlanjutan tercermin melalui kebijakan *sustainable finance*. Bank mulai memasukkan aspek lingkungan dan sosial dalam penilaian kredit untuk mengurangi risiko pembiayaan. Pendekatan ini juga mendorong pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan. Dengan demikian, sektor keuangan berperan sebagai katalisator dalam transformasi ekonomi berkelanjutan. Weber (2017) menjelaskan bahwa lembaga keuangan memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan berkelanjutan melalui kebijakan pembiayaan yang bertanggung jawab.

Pada sektor ekstraktif seperti pertambangan dan energi, penerapan akuntansi keberlanjutan difokuskan pada pengelolaan dampak lingkungan dan hubungan dengan masyarakat. Perusahaan mulai menerapkan sistem manajemen lingkungan yang lebih

BAB 14

MASA DEPAN AKUNTANSI KEBERLANJUTAN

14.1 Transformasi Digital dan Sustainability Data

Pembelajaran strategis dari berbagai studi kasus perusahaan menunjukkan bahwa implementasi akuntansi keberlanjutan tidak hanya bergantung pada aspek teknis pelaporan, tetapi juga pada kemampuan organisasi dalam mengintegrasikan berbagai elemen manajerial secara menyeluruh. Hal ini mencakup integrasi antara strategi bisnis, tata kelola perusahaan, serta hubungan dengan pemangku kepentingan yang relevan. Perusahaan yang berhasil umumnya memiliki pendekatan yang sistematis dalam mengoordinasikan faktor-faktor tersebut sehingga implementasi keberlanjutan berjalan secara konsisten. Selain itu, pembelajaran dari praktik terbaik (*best practices*) memungkinkan perusahaan meningkatkan efektivitas kebijakan keberlanjutan yang diterapkan. Oleh karena itu, studi kasus menjadi sumber referensi penting dalam mengembangkan model implementasi akuntansi keberlanjutan yang lebih komprehensif dan adaptif (Eccles, Ioannou, & Serafeim, 2014).

Salah satu pembelajaran utama yang dapat diambil adalah pentingnya integrasi keberlanjutan dalam strategi bisnis perusahaan. Keberlanjutan tidak dapat dipisahkan dari proses perencanaan strategis karena berkaitan langsung dengan pengelolaan risiko dan penciptaan nilai jangka panjang. Perusahaan yang mampu mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam strategi bisnisnya cenderung memiliki kinerja yang lebih stabil dalam jangka panjang. Integrasi ini juga memungkinkan perusahaan mengidentifikasi peluang inovasi yang berkaitan dengan ekonomi hijau dan transformasi bisnis berkelanjutan. Dengan demikian, keberlanjutan menjadi bagian dari strategi kompetitif perusahaan dalam menghadapi dinamika pasar global (Porter & Kramer, 2011).

Selain itu, transparansi dan kualitas pelaporan keberlanjutan menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan pemangku kepentingan. Laporan ESG yang disusun secara sistematis memberikan informasi yang relevan mengenai dampak aktivitas perusahaan terhadap lingkungan dan sosial. Transparansi tersebut tidak hanya meningkatkan akuntabilitas perusahaan, tetapi juga membantu investor dalam melakukan analisis risiko dan peluang investasi. Mekanisme seperti sustainability assurance turut memperkuat kredibilitas informasi yang disajikan dalam laporan keberlanjutan. Oleh karena itu, kualitas pelaporan ESG menjadi indikator penting dalam menilai komitmen perusahaan terhadap praktik bisnis berkelanjutan (Irsyani et al., 2025).

Pembelajaran berikutnya adalah pentingnya penguatan tata kelola perusahaan dalam mendukung implementasi keberlanjutan. Corporate governance yang baik memungkinkan

perusahaan memiliki sistem pengawasan yang efektif serta mekanisme pengendalian internal yang memadai. Struktur tata kelola yang kuat juga membantu memastikan bahwa kebijakan keberlanjutan dijalankan secara konsisten di seluruh organisasi. Selain itu, tata kelola yang transparan dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata investor dan regulator. Dengan demikian, tata kelola perusahaan menjadi fondasi penting dalam keberhasilan implementasi ESG (Eccles & Klimenko, 2019).

Di sisi lain, berbagai kasus menunjukkan bahwa kurangnya transparansi dalam pelaporan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap reputasi perusahaan. Manipulasi laporan atau penyajian informasi yang tidak akurat dapat menurunkan kepercayaan investor secara signifikan. Penurunan kepercayaan tersebut dapat berdampak pada kinerja pasar perusahaan, termasuk penurunan harga saham dan peningkatan risiko investasi. Selain itu, praktik pelaporan yang tidak transparan juga dapat merusak legitimasi sosial perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, integritas dalam pelaporan menjadi aspek krusial dalam menjaga stabilitas perusahaan (Kosasih & Astawa, 2025).

Pembelajaran strategis lainnya adalah pentingnya kolaborasi dengan pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi keberlanjutan. Perusahaan yang mampu menjalin hubungan baik dengan investor, regulator, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah cenderung memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Kolaborasi ini memungkinkan perusahaan memperoleh perspektif yang lebih luas dalam merumuskan kebijakan keberlanjutan. Selain itu, hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan juga meningkatkan legitimasi sosial perusahaan. Dengan demikian, kolaborasi menjadi elemen penting dalam menciptakan keberlanjutan jangka panjang (Suchman, 1995).

Selain kolaborasi eksternal, penguatan kapasitas internal organisasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi ESG. Perusahaan perlu memiliki sumber daya manusia yang kompeten serta sistem informasi yang mampu mengelola data keberlanjutan secara efektif. Program pelatihan dan pengembangan kompetensi menjadi penting untuk meningkatkan pemahaman karyawan terhadap prinsip keberlanjutan. Selain itu, kapasitas internal yang kuat memungkinkan perusahaan menyusun laporan ESG yang sesuai dengan standar internasional. Dengan demikian, penguatan kapasitas organisasi menjadi kunci dalam keberhasilan implementasi keberlanjutan (Schaltegger & Burritt, 2010).

Kepemimpinan juga menjadi faktor krusial dalam menentukan keberhasilan implementasi keberlanjutan. Komitmen manajemen puncak memiliki pengaruh besar terhadap arah strategis perusahaan dalam mengintegrasikan prinsip ESG. Pemimpin yang memiliki visi jangka panjang terhadap keberlanjutan akan mendorong organisasi untuk mengalokasikan sumber daya secara optimal. Selain itu, kepemimpinan yang kuat juga membentuk budaya organisasi yang mendukung praktik keberlanjutan. Oleh karena itu, peran manajemen puncak menjadi faktor penentu dalam keberhasilan transformasi bisnis berkelanjutan (Eccles & Klimenko, 2019).

RERERENCES

- Adams, C. (2015). *The International Integrated Reporting Council: A call to action*. Critical Perspectives on Accounting.
- Adams, C. (2017). Conceptualising the Contemporary Corporate Value Creation Process. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*.
- Agustiniingsih, W., & Noviawan, L. A. (2024). Tinjauan Literature Sistematis: Dampak Transformasi Digital terhadap Kinerja ESG. *Zentrum Economic, Business, Management, Accounting Research*, 2(1), 27-35.
- Ahmar, N. (2025). *Membangun Masa Depan Berkelanjutan Akutansi, Governance, dan Inovasi di Perguruan Tinggi*. AE Publishing.
- Akbar, K. R. (2025). STRATEGI PENINGKATAN KINERJA KEBERLANJUTAN RUMAH SAKIT: INTEGRASI INOVASI DAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DIGITAL (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Amalia, F. C. (2025). PENGARUH ENVIRONMENTAL SOCIAL GOVERNANCE (ESG) DISCLOSURE DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Amaliyah, F., & Herwiyanti, E. (2019). Pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit terhadap nilai perusahaan sektor pertambangan. *Jurnal Akuntansi ISSN*, 9(3), 2019.
- Amaliyah, F., & Putranto, R. S. (2025). Peran Akuntansi Operasional dalam Mewujudkan Triple Bottom Line. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 1445-1456.
- Amaly, A. C. N. (2023). Analisis Biaya Lingkungan Terhadap Pengelolaan Limbah Pada Rumah Sakit Umum Daerah (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Amerieska, S., Narsa, I. M., & Ningsih, S. (2023). Manajemen Resiko Berbasis Stewardship dalam Keberlanjutan BUMDes. *JATI: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 173-189.
- Amran, A., Lee, S. P., & Devi, S. S. (2014). The influence of governance structure and strategic corporate social responsibility toward sustainability reporting quality. *Business Strategy and the environment*, 23(4), 217-235.
- Amran, A., Lee, S., & Selvaraj, S. (2013). Sustainability reporting and board governance. *Journal of Cleaner Production*.
- Andini, A., Yuliasari, F., Saniagi, M. R., Apriani, N., & Aji, G. (2024). Evolusi dan Implementasi Teori Akuntansi Syariah di Era Modern. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(6), 894-901.
- Anthony, R., & Govindarajan, V. (2007). *Management Control Systems*. McGraw-Hill.

- Arcila, J. O. S., Polo, O. C. C., Porras, N. A. S., & Vásquez, J. A. U. (2023). Environmental Costing Model, Applied to a Lasallian University Case Study. *Revista De Gestão Social E Ambiental*, 17(3), 1-12.
- Aresteria, M. (2018). Peran audit internal dalam pencegahan fraud di perguruan tinggi: Literature review. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 6(1), 45-53.
- Ascui, F., & Lovell, H. (2011). As Frames Collide: Making Sense of Carbon Accounting. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*.
- Azkiya, M. Z., Hersanda, R., & Putri, S. A. (2025). Tantangan Dan Peluang Pasar Modal Indonesia Di Era Globalisasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(3), 213-221.
- Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. *Journal of Management*.
- Bartlett, C., & Ghoshal, S. (2002). Managing Across Borders: The Transnational Solution.
- Belkaoui, A. (2004). *Accounting Theory*. Thomson Learning.
- Billi, M., Mascareño, A., & Edwards, J. (2021). Governing sustainability or sustainable governance? Semantic constellations on the sustainability-governance intersection in academic literature. *Journal of cleaner production*, 279, 123523.
- Biswan, A. T., & Hidayat, E. A. P. (2023). Green Bonds: Suatu Ancangan Akuntansi Berwawasan Lingkungan. *Bunga Rampai Akuntansi Pemerintah Indonesia Kontemporer*, 1.
- Bocken, N. et al. (2016). Product design and business model strategies for a circular economy. *Journal of Industrial and Production Engineering*.
- Bocken, N., Short, S., Rana, P., & Evans, S. (2016). Sustainable Business Model Archetypes. *Journal of Cleaner Production*.
- Bolton, P., & Kacperczyk, M. (2021). Do Investors Care about Carbon Risk? *Journal of Financial Economics*.
- Budiarti, I. (2011). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate governance (GCG) Pada Dunia Perbankan. *Majalah Ilmiah UNIKOM*.
- Burritt, R., & Schaltegger, S. (2010). Sustainability accounting and reporting.
- Burritt, R., Hahn, T., & Schaltegger, S. (2002). Towards a Comprehensive Framework for Environmental Management Accounting. *Australian Accounting Review*.
- Bush, S. R., Oosterveer, P., Bailey, M., & Mol, A. P. (2015). Sustainability governance of chains and networks: A review and future outlook. *Journal of cleaner production*, 107, 8-19.
- Bush, S., Toonen, H., Oosterveer, P., & Mol, A. (2014). The “devils triangle” of MSC certification. *Marine Policy*.
- Bushman, R., & Smith, A. (2001). Financial accounting information and corporate governance. *Journal of Accounting and Economics*.

- Cagno, E., Micheli, G. J., & Trucco, P. (2012). Eco-efficiency for sustainable manufacturing: an extended environmental costing method. *Production Planning & Control*, 23(2-3), 134-144.
- Cendekiawan, M., & Firmansyah, A. (2024). Pengembangan Green Bonds Di Indonesia: Upaya Pemerintah Untuk Mewujudkan Keuangan Berkelanjutan. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(1), 87-100.
- Charter, M., & Tischner, U. (2001). Sustainable Solutions: Developing Products and Services for the Future.
- Clark, G., Feiner, A., & Viehs, M. (2015). From the Stockholder to the Stakeholder: How Sustainability Can Drive Financial Outperformance.
- COSO. (2017). Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance.
- Curran, M. (2017). Life Cycle Assessment Handbook.
- Daly, H., & Farley, J. (2011). Ecological Economics: Principles and Applications.
- Deegan, C. (2002). The legitimising effect of social and environmental disclosures. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*.
- Deegan, C. (2014). *Financial Accounting Theory*. McGraw-Hill.
- Delmas, M., & Toffel, M. (2008). Organizational responses to environmental demands. *Strategic Management Journal*.
- Desviani, D. P., Sinatra, Z. A. R., Sianipar, C. M. M., Kusumaningtias, R., & Kusumaningsih, A. (2025). Good Corporate governance Dan Informasi Akuntansi: Keseimbangan Antara Tanggung Jawab Kepada Pemegang Saham Dan Stakeholder. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(11. C), 172-177.
- Deswanto, V. (2022). Literature Review: *Green accounting* Era 4.0 Menuju Society 5.0. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Manajemen Malahayati*, 11(2), 42-48.
- DeZoort, F., Hermanson, D., Archambeault, D., & Reed, S. (2002). Audit Committee Effectiveness: A Synthesis of the Empirical Audit Committee Literature. *Journal of Accounting Literature*.
- DiMaggio, P., & Powell, W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American Sociological Review*.
- Donaldson, T., & Preston, L. (1995). The stakeholder theory of the corporation. *Academy of Management Review*.
- Donaldson, T., & Preston, L. (1995). The stakeholder theory of the corporation. *Academy of Management Review*.
- Dosinta, N. F., Brata, H., & Heniwati, E. (2018). Haruskah Value Creation Hanya Terdapat Pada Integrated Reporting?. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 248-266.
- Eccles, R., & Klimenko, S. (2019). The Investor Revolution. *Harvard Business Review*.

INDEKS

A

Akuntansi hijau · 245, 248
Akuntansi keberlanjutan · 7, 8, 14, 51, 245, 248
Akuntansi lingkungan · 245
Akuntansi manajemen · 33, 245
Artificial Intelligence · viii, 159, 219, 223, 226, 229, 239, 241, 242, 245, 248
Assurance laporan keberlanjutan · 245, 248

B

Big Data · 232, 245, 248
Bisnis berkelanjutan · 245
Blockchain · 13, 245, 248

C

Carbon accounting · 99, 245
Circular economy · 71, 77, 245
Cleaner production · 101, 234, 245
Corporate governance · vii, 5, 130, 132, 134, 135, 136, 139, 213, 216, 230, 231, 236, 237, 240, 241, 245
Corporate social responsibility · 238, 245

D

Data keberlanjutan · 245
Disrupsi iklim · 245

E

Eco-efficiency · 101, 231, 245, 248
Enterprise risk management · 245
Environmental accounting · 239, 240, 245
Environmental costing · 90, 245
Environmental, Social, and Governance (ESG) · 37, 49, 55, 111, 112, 150, 158, 166, 181, 187, 189, 193, 197, 203, 210, 223, 225, 239, 245, 248

F

Fintech · 246

G

Good corporate governance · 132, 246
Governance · v, vii, 37, 49, 55, 111, 112, 113, 140, 150, 158, 166, 181, 187, 189, 193, 197, 203, 210, 223, 225, 229, 232, 233, 236, 239, 245, 246, 248
Green bonds · 184, 246
Green economy · 71, 78, 246
Green finance · 246

I

Inovasi produk ramah lingkungan · 106, 108, 246
Integrated reporting · 31, 246
Internet of Things · 75, 81, 223, 246

K

Keberlanjutan perusahaan · 246
Keunggulan kompetitif · 51, 54, 246
Kinerja keberlanjutan · 246

L

Legitimacy theory · 28, 246
Life cycle assessment · 234, 235, 241, 246

M

Manajemen risiko · 246
Model bisnis berkelanjutan · 246

P

Pelaporan keberlanjutan · 175, 246

Pengelolaan energi · 109, 246
Pengelolaan limbah · 103, 246
Pengendalian internal · 133, 156, 158, 160, 167, 246
Profitabilitas perusahaan · 246

R

Regulasi keberlanjutan · 246
Reputasi perusahaan · 111, 139, 246
Risiko lingkungan · 150, 151, 246

S

Stakeholder theory · 23, 28, 246
Sustainability governance · 140, 143, 230, 246
Sustainability performance measurement · 246

Sustainability report · 174, 175, 178, 234, 246
Sustainable finance · 181, 182, 184, 246

T

Task Force on Climate-related Financial
Disclosures · vii, 68, 115, 120, 198, 232, 241, 247
Transparansi · vii, 23, 24, 25, 38, 42, 49, 52, 86, 89,
99, 116, 131, 134, 145, 147, 148, 198, 201, 208, 211,
212, 216, 226, 236, 237, 238, 240, 247
Triple bottom line · 247

V

Value creation · 247

GLOSARIUM

❖ **Akuntansi hijau (*Green accounting*)**

Sistem akuntansi yang mengintegrasikan aspek lingkungan dalam proses pencatatan, pengukuran, dan pelaporan aktivitas ekonomi perusahaan.

❖ **Akuntansi keberlanjutan (*Sustainability Accounting*)**

Pendekatan akuntansi yang menggabungkan informasi keuangan dan non-keuangan untuk menilai kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan.

❖ **Artificial Intelligence (AI)**

Teknologi kecerdasan buatan yang memungkinkan sistem komputer melakukan analisis data, pembelajaran, dan pengambilan keputusan secara otomatis.

❖ **Assurance laporan keberlanjutan**

Proses verifikasi independen terhadap laporan keberlanjutan untuk memastikan keakuratan dan kredibilitas informasi yang disampaikan perusahaan.

❖ **Big Data**

Kumpulan data dalam jumlah besar dan kompleks yang dapat dianalisis untuk menghasilkan informasi strategis bagi organisasi.

❖ **Blockchain**

Teknologi pencatatan data terdistribusi yang memungkinkan transaksi dan informasi disimpan secara aman, transparan, dan tidak dapat dimanipulasi.

❖ **Carbon Accounting**

Proses pengukuran dan pelaporan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh aktivitas perusahaan.

❖ **Circular Economy**

Model ekonomi yang menekankan penggunaan kembali sumber daya, pengurangan limbah, serta pemanfaatan kembali produk dalam siklus produksi.

❖ **Cleaner Production**

Pendekatan produksi yang bertujuan mengurangi dampak lingkungan melalui efisiensi penggunaan sumber daya dan pengurangan limbah.

❖ **Corporate Social Responsibility (CSR)**

Komitmen perusahaan untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan.

❖ **Eco-efficiency**

Pendekatan manajemen yang bertujuan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya sekaligus mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas bisnis.

❖ **Environmental, Social, and Governance (ESG)**

Kerangka evaluasi yang digunakan untuk menilai kinerja perusahaan berdasarkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan.

❖ **Enterprise Risk Management (ERM)**

Pendekatan manajemen risiko yang terintegrasi untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko organisasi secara menyeluruh.

❖ **Green Bonds**

Instrumen keuangan berupa obligasi yang digunakan untuk mendanai proyek-proyek ramah lingkungan.

❖ **Green Economy**

Model pembangunan ekonomi yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial.

❖ **Integrated Reporting**

Pendekatan pelaporan yang menggabungkan informasi keuangan dan non-keuangan dalam satu laporan yang terintegrasi.

❖ **Life Cycle Assessment (LCA)**

Metode analisis untuk menilai dampak lingkungan suatu produk sepanjang siklus hidupnya, mulai dari produksi hingga pembuangan.

❖ **Stakeholder Theory**

Teori yang menyatakan bahwa perusahaan harus mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya pemegang saham.

❖ **Sustainability Performance Measurement**

Proses pengukuran kinerja perusahaan berdasarkan indikator keberlanjutan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

❖ **Sustainability Report**

Laporan yang mengungkapkan kinerja perusahaan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan kepada pemangku kepentingan.

❖ **Sustainable Finance**

Pendekatan pembiayaan yang mempertimbangkan faktor keberlanjutan dalam pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan.

❖ **Triple Bottom Line**

Konsep pengukuran kinerja perusahaan berdasarkan tiga dimensi utama yaitu profit (ekonomi), people (sosial), dan planet (lingkungan).

PROFIL PENULIS



Dr. Desak Nyoman Sri Werastuti. SE., M.Si., Ak., CA., CSRA., CSRS., Seorang Akademisi pada Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi, Program Pascasarjana, Universitas Pendidikan Ganesha. Lahir di Gianyar, 6 Desember 1979. Bidang kepakaran AKuntansi Keberlanjutan, Akuntansi Keuangan, dan Akuntansi Manajemen. Penulis menyelesaikan studi S3 pada Program Doktor Ilmu Akuntansi, Universitas Brawijaya pada tahun 2019.

Untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemdiktisaintek. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa.

Email Penulis: sri.werastuti@undiksha.ac.id

AKUNTANSI KEBERLANJUTAN; AKUNTANSI HIJAU; GOVERNANCE:

Strategi Keberlanjutan Bisnis

Bagaimana perusahaan dapat tetap bertumbuh tanpa mengorbankan lingkungan, masyarakat, dan tata kelola yang baik? Buku "Akuntansi Keberlanjutan; Akuntansi Hijau; Governance: Strategi Keberlanjutan Bisnis" menghadirkan pembahasan komprehensif mengenai transformasi paradigma akuntansi dari sekadar pelaporan keuangan menuju sistem pertanggungjawaban yang holistik dan berorientasi masa depan. Buku ini mengulas konsep dasar akuntansi keberlanjutan, praktik akuntansi hijau dalam pengukuran dampak lingkungan, serta peran governance dalam memastikan integritas, transparansi, dan akuntabilitas perusahaan. Dilengkapi dengan kerangka pelaporan ESG, integrasi SDGs dalam strategi korporasi, serta tantangan implementasi di era ekonomi hijau, buku ini menjadi panduan strategis bagi akademisi, mahasiswa, praktisi, dan pengambil kebijakan dalam membangun model bisnis yang berdaya saing sekaligus bertanggung jawab secara sosial dan ekologis.



Seorang Akademisi pada Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi, Program Pascasarjana, Universitas Pendidikan Ganesha. Lahir di Gianyar, 6 Desember 1979. Bidang kepakaran AKuntansi Keberlanjutan, Akuntansi Keuangan, dan Akuntansi Manajemen. Penulis menyelesaikan studi S3 pada Program Doktor Ilmu Akuntansi, Universitas Brawijaya pada tahun 2019.

Untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemdiktisaintek. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan

kontribusi positif bagi bangsa.

Email Penulis: sri.werastuti@undiksha.ac.id



 www.sketsamedia.id
 sketsamediaid@gmail.com
 www.shop.sketsamedia.id
 0821-3818-5550



IKAPI
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
2013/2016/2022



Harga P.Jawa Rp222.000